

**IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA
LAUT DENDANG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tagas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Mencapai Gelar Serjana Sosial (S. Sos)**

OLEH:

**MUSTOFA HUSEIN
NIM. 13144026**

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA
LAUT DENDANG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tagas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)**

OLEH:

MUSTOFA HUSEIN

NIM. 13144026

ProgamStudi :Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Muaz Tanjung, MA.
NIP.19661019 200501 1 003**

**Tengku Walisyah,MA.
NIP. 19840601 201101 2 018**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Implementasi Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.” oleh Saudari Mustofa Husein, Nim 13.14.4.026, telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah pada tanggal 16 Juli 2018 dan diterima, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 30 Juli 2018

Penguji I

Muas Tanjung, MA.
NIP.19661019 200501 1 003

Penguji III

Irma Yusriani Simamora, MA
Nip. 19751204 200901 2 002

Penguji II

Tengku Walisyah, MA.
NIP. 19840601 201101 2 018

Penguji IV

Dr, Soiman, MA
Nip. 19660507 199403 1 005

Mengetahui
An Dekan
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

H. Muaz Tanjung, MA
Nip. 1966119 200501 1 003

PENGESAHAN

Sripsi yang berjudul : “**Implementasi Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.**”, An. Mustofa Husein telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah pada tanggal 16 Juli 2018, dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Panitia Ujian Munaqasah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Muaz Tanjung, MA
NIP. 19661019 200501 1 003
20070 1 014

Salamuddin, MA
NIP. 19740719

Anggota Penguji:

- | | |
|---|--------|
| 1. Dr. Soiman, MA
Nip. 19660507 199403 1 005 | 1..... |
| 2. Tengku Walisyah,MA.
NIP. 19840601 201101 2 018 | 2..... |
| 3. Dr. H. Muaz Tanjung, MA
NIP. 19661019 200501 1 003 | 3..... |
| 4. Irma Yusriani Simamora, MA
Nip. 19751204 200901 2 002 | 4..... |

Mengetahui:

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA

Dr. Soiman, MA
NIP. 19660507 199403 1 005

ABSTRAK

Nama : MUSTOFA HUSEIN

Nim : 13144026

Fakultas/jurusan : Dakwah dan Komunikasi/ Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) I DESA LAUT DENDANG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

Pembimbing I : **Dr. H. Muaz Tanjung, MA.**

Pembimbing II : **Tengku Walisyah,MA.**

Pembangunan berbasis ekonomi di desa sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi di tingkat desa bertujuan untuk mengelola potensi desa serta mensejahterakan masyarakat desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah desa melalui Musyawarah Desa. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.

Kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Laut Dendang sudah dilaksanakan sejak tahun 2006. Pelaksanaan Kebijakan selalu melibatkan aktor-aktor kebijakan, sehingga tidak lepas dari adanya kepentingan dari pelaksana didalam implementasinya. Fokus penelitian ini ada tiga, yang pertama siapa saja aktor yang menjadi penggerak program Badan Usaha Milik Desa. Kedua, Bagaimana karakteristik lembaga pemerintah desa yang memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa. Ketiga, bagaimana kepatuhan pelaksana Badan Usaha Milik Desa.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melalui wawancara, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan kualitatif. Pada proses implementasi kebijakan Badan Usaha Milik

Desa, banyak faktor yang mempengaruhi. Adanya kepentingan aktor pelaksana kebijakan yang memengaruhi hasil kebijakan tersebut, baik kepentingan individu maupun kelompok. Karakteristik lembaga pemerintah desa berpengaruh terhadap hasil implementasi, lembaga yang tertutup menghambat implementasi dan lembaga yang terbuka cenderung mendorong pelaksanaan kebijakan. Dalam mendorong kepatuhan pelaksana kebijakan, pemerintah desa mengadakan evaluasi dan juga adanya Laporan Pertanggungjawaban melihat pelaksanaan kebijakan. Peran dan respon pemerintah desa berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa.

Nomor : Istimewa Medan, 25 Mei 2018
 Lamp :
 Hal : Skripsi Kepada Yth,
 a.n. Mustofa Husein Bapak Dekan Fak.
 Dakwah dan Komunikasi
 UIN SU Medan
 Di
 M e d a n

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan sarana-sarana seperlunya untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi mahasiswa an. Ria Afrilia yang berjudul **“Implementasi Pengembangan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.”**

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar serjana Sosial dalam Ilmu Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatra Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kiranya saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalam

Pembimbing I

Pembimbing II

Muas Tanjung, MA.

Tengku Walisyah,MA.

NIP.19661019 200501 1 003

NIP. 19840601 201101 2 018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mustofa Husein

Nim : 13144026

Program Study : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Skripsi : Implementasi Pengembangan Masyarakat Melalui Badan
Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Laut Dendang Kec.
Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan Universitas batal saya terima.

Medan, 25 mei 2018

Yang membuat pernyataan

Mustofa Husein

Nim. 13144026

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Batasan Istilah	6
4. Tujuan Penelitian.....	7
5. Manfaat Penelitian.....	7
6. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
1. Kerangka Teori.....	9
a. Pengertian Pengembangan Masyarakat.....	9
b. Pemberdayaan sebagai Proses Pengembangan Ekonomi Masyarakat	13
c. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	15
d. Langkah-langkah Pengembangan Ekonomi Masyarakat	18
2. Teori Konsep	19
1) Kedudukan BUMDes	19
2) Implementasi Kebijakan BUMDes	23
3) Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui BUMDes.....	24
3. Kajian Terdahulu.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
a) Jenis Penelitian.....	29
b) Lokasi Penelitian.....	29
c) Sumber Data.....	29
d) Informan Penelitian.....	30
e) Teknik Pengumpulan Data.....	31
f) Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
a. Implementasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui	37
BUMDes di Desa Laut Dendang	
b. BUMDes Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat.....	40
di Desa Laut Dendang	
c. Hambatan BUMDes Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat ..	42
di Desa Laut Dendang	

BAB V PENUTUP	46
a. Kesimpulan.....	46
b. Saran.....	48
Daftar Pustaka	50
LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kaya raya dan subur. Kekayaan alam dan laut melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke. Dengan kekayaan yang dimiliki tersebut mampu mencukupi kebutuhan seluruh warga masyarakat. Setiap wilayah atau desa memiliki potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat Desa untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga. Pembangunan Desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan Nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara Nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia.¹

Pembangunan Nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk Bangsa Indonesia sendiri hidup di kawasan pedesaan.² Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Desa menurut Widjaya adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Seperti yang di terangkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ra'd : 11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sampai mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Pembangunan Nasional pada umumnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sektor ekonomi. Desa menjadi sentral utama pengembangan ekonomi karena desa merupakan sektor awal perputaran kegiatan perekonomian Negara.³ Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama.

Akan tetapi pada kenyataannya, pembangunan pedesaan dirasa masih kurang sehingga masih banyak pedesaan yang tertinggal. Padahal telah banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan masalah keteringgalan desa tersebut, seperti meningkatkan anggaran untuk pembangunan desa dari tahun ke

¹ Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2011), h. 56.

² Atik Budiarto, *Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 114.

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.

tahun agar mampu mengurangi jumlah desa yang tertinggal, dan beberapa program lainnya. Pengaturan desa antara lain bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, serta memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan Nasional. Namun saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas⁴ sumberdaya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masalah mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat. Sekarang saatnya kita membangun Desa berbasis pada potensi desa yang dimiliki.

Skala prioritas tersebut diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan didirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya, maka BUMDes perlu didirikan. BUMDes menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes sebelumnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai kerangka dasar otonomi daerah yang mengamatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah *Bottom-up planning*) dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.⁵ Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Tahun 2015 merupakan tahun pertama dilaksanakannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang desa, yang merupakan bagian dari ikhtiar mencapai keberdayaan negara dan bangsa Indonesia

⁴Edi Sueharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: PT. Rekan Aditama, 2010), h. 68.

⁵*Ibid*, h. 66.

dari kemandirian desa-desanya. Adapun untuk mewujudkan desa yang mandiri diperlukan adanya strategi pembangunan.⁶

Senada dalam hal tersebut pada penelitian ini BUMDes yang saya sebutkan bernama BUMDes Bumi Pertiwi yang berlokasi di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang berkebetulan hanya ada satu BUMDes di lokasi tersebut. Salah satu program BUMDes Bumi Pertiwi dalam peningkatan ekonomi masyarakat yaitu dengan memberikan pinjaman kepada warga yang membutuhkan untuk di jadikan usaha ataupun menjadi tambahan modal untuk usaha yang dijalankannya. Seperti usaha bubur, lontong, membuka ruko, catering, dan usaha menengah lainnya. Dengan adanya bantuan dalam bentuk nyata dari BUMDes Bumi Pertiwi terbukti memberikan pemasukan tambahan bagi masyarakat setempat.

Atas dasar kondisi tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji, “Implementasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ?
2. Bagaimana BUMDes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Laut Dendang?
3. Apa hambatan BUMDes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Laut Dendang?

C. Batasan Istilah

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci atau matang.
2. Pengembangan dalam kamus besar bahasa Indonesia, Pengembangan secara etimologi berasal dari kata kembang yang menjadi tambah sempurna (tentang pribadi, fikiran, pengetahuan dan sebagainya), pengembangan berarti proses, cara, perbuatan.
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat yang berada didesa Laut Dendang.
4. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterkaitan untuk

⁶Hayat. 2013. Realokasi Kebijakan Fiskal; Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Bina Praja, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2013.

mencapai tujuan bersama. Masyarakat juga di katakan adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhannya yang terkait oleh sistem sosial melalui peranan solidaritas dengan di latarbelakangi oleh adanya persamaan sejarah, politik dan kebudayaan.

5. Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan).

D. Tujuan Penelitian.

1. Untuk bagaimana mengetahui implementasi pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ?
3. Untuk mengetahui Apa hambatan BUMDes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Laut Dendang?

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan pengetahuan, perkembangan keilmuan dan sebagai bahan latihan bagi penuli dalam penulisan karya ilmiah serta menambah wawasan peneliti dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

2. Secara Akademis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan kajian Pengembangan Masyarakat Islam.

3. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain, khususnya pihak-pihak yang terkait yang meneliti masalah ini lebih lanjut dan lebih dalam lagi.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini akan dibagi kepada beberapa pokok pembahasan dan dijelaskan dalam sub-sub pembahasan.

BAB I. Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II. Landasan teori yang berhubungan dengan implementasi, pengembangan, ekonomi, masyarakat.

BAB III. Metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan lokasi penelitian.

Bab IV. Hasil penelitian.

Bab V. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini berisikan tentang hasil kesimpulan dan saran bagi yang berkaitan dengan penulis skripsi ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Pengembangan Masyarakat

1. Pengertian Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat adalah “ *The process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective action*”⁷. Sedangkan menurut United Nation, Pengembangan masyarakat adalah “suatu proses yang didesain untuk menciptakan kondisi ekonomi dan kemajuan sosial untuk komunitas yang berhubungan dengan partisipasi aktif dan untuk memenuhi kemungkinan kepercayaan atas inisiatif komunitas”.

Secara umum, pengembangan masyarakat diartikan sebagai sebuah upaya untuk memperluas, atau meningkatkan, atau mengubah potensi-potensi yang ada dalam suatu masyarakat ke suatu keadaan sebelumnya.⁸

Berdasarkan pengertian diatas, pengembangan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kondisi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Pengembangan masyarakat mencakup aspek kuantitas, dan aspek kontinuitas serta meliputi dimensi cukup luas dan tatarannya yang bervariasi dari kognitif sampai kepada afektif.

Program selalu berasal dan untuk pemenuhan masyarakat, sehingga yang merencanakan adalah agen bersama masyarakat (kemandirian artinya tujuan utama dari program untuk mengentaskan masyarakat dengan dirinya sendiri, dan agen hanya sebagai stimulus. Keswadaayan artinya bahwa setiap program harus dilakukan dengan kemampuan diri sendiri, sehingga segala bentuk intervensi hanyalah sebagai insentif saja. Dan partisipasi diartikan bahwa setiap program melibatkan masyarakat, baik fisik, ide, dan materi. Keterlibatan disini memiliki makna keikutsertaan masyarakat secara fisik dan mentalitas.

Jim Ife dalam bukunya menganggap bahwa dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat, semakin banyak orang yang menjadi peserta aktif dan semakin lengkap partisipasinya, semakin ideal kepemilikan dan proses masyarakat serta proses-proses inklusif yang diwujudkan. Partisipasi sangat penting untuk

⁷Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat* (Teori dan Praktik). (Jakarta : Kencana 2013), h. 123.

⁸Ayub M. Padangaran, *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, (Kendari : Unhalu Press, 2011), h. 29.

perubahan dari bawah dan sangat penting dalam mempertahankan fokus pada proses.⁹

Pengembangan masyarakat memang menekankan pada proses, bukan hasil. Dimana dalam konsep pengembangan masyarakat berbeda dengan pembangunan yang didominasi oleh persoalan hasil dan tujuan. Namun untuk saat ini pengembangan masyarakat merupakan konsep dari pembangunan berbasis masyarakat, dimana dalam implementasinya partisipasi adalah prinsip fundamental dalam pengembangan masyarakat.

Indikator keberhasilan dalam pengembangan masyarakat adalah adanya kerja kolektif dari stakeholder pengembangan masyarakat itu sendiri. Yang menjadi stakeholder pengembangan masyarakat adalah :

- a. Pemerintah berperan dalam menciptakan gambaran program, mencari sumber dana, penglokasian dana, menjadi penghubung dengan pihak swasta.
- b. Organisasi sebagai salah satu indikator dalam mendukung pemerintah sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
- c. Masyarakat adalah sebagai penerima manfaat dari upaya yang direncanakan pemerintah.¹⁰

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Menurut Jim Ife mendefinisikan pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan-nya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya. Maka secara operasional pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses memampukan dan memandirikan masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki agar tidak ketergantungan dengan pemberian pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan, apabila dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat bukannya meningkatkan produksi. Konsep ini mengubah prinsip yang selama ini dianut, yaitu bahwa pencapaian pembangunan lebih diarahkan pemenuhan target-target variable ekonomi makro. Upaya untuk mewujudkan tujuan ini, antara lain berupa pembentukan bentuk usaha kemitraan yang mutualistis antara orang lokal dengan orang-orang yang lebih mampu.

⁹JIM Ife Frank Tesoriere, *Community Develoment*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2008), h. 335.

¹⁰Puji Hadiyanti, *Menjadi Fasilitator PM yang Kapabel*, disampaikan pada Pelatihan Fasilitator PMI bagi Mahasiswa PMI, 25 Februari 2017.

Ada tiga tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri, ketiga tahap itu adalah :

1. Tahap penyadaran, yaitu tahap dimana masyarakat diberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik.
2. Tahap pengkapasitasan (*capacity building*), atau memampukan (*enabling*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi pengetahuan , ketrampilan, fasilitas, organisasi, dan sistem nilai atau aturan main.
3. Tahap pendayaan (*empowerment*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, ketrampilan kemampuan yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri. Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah: program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan kebergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.

2. Pemberdayaan sebagai Proses Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Di dalam konsep pengembangan masyarakat terkandung kata pemberdayaan (*empowering*) yaitu upaya untuk membuat masyarakat berdaya. Pemberdayaan menjadi prinsip utama dalam mengembangkan kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Pemberdayaan adalah salah satu upaya untuk mencapai keberlanjutan setiap program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada pengembangan sosial ekonom masyarakat. pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adalah dua konsep yang tidak bisa terpisahkan, yang setiap programnya berasal dari inisiatif masyarakat setempat dan mengoptimalkan kerja nyata masyarakat itu sendiri.

Upaya pemberdayaan merupakan bantuan transformatif yaitu bantuan yang membuat orang yang menerimanya menjadi berubah kearah yang lebih baik melalui upaya sendiri. Aktifitas LSM dalam menangani kegiatan pengembangan masyarakat diharapkan berujung pada terealisasikannya proses pemberdayaan masyarakat. Hal itu bisa dipahami karena kegiatan pengembangan masyarakat pada awalnya memang difokuskan pada pencapaian target perubahan kuantatif yang di indikasikan dengan tersedianya sarana fisik dan perbaikan tingkat kehidupan materil. Namun hal tersebut direalisasikan dengan perubahan target kuantitatif ini sebagai modal awal menuju proses perubahan kualitatif yang ditandai dengan terbedayakannya masyarakat.

Menurut Baonewidjojo, menyimpulkan bahwa pengembangan masyarakat adalah upaya untuk mencapai enam tujuan yaitu:

- a. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan partisipasi masyarakat.
- c. Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

- d. Menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri.
- e. Membangun serta memelihara sarana dan prasarana fisik wilayahnya.
- f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Menurut Ife Pengembangan Ekonomi Masyarakat merupakan upaya merelokasikan aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar dapat mendapatkan keuntungan bagi masyarakat dan untuk merevitalisasi masyarakat serta untuk memperbaiki kualitas kehidupan.¹²

Sedangkan menurut Kartasmita pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.¹³ Maka dengan demikian yang dimaksud dengan pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya atau metode dalam menjalankan aktivitas ekonomi guna pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individu dan kelompok demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Strategi efektif dalam merealisasikan pengembangan ekonomi masyarakat adalah dengan cara memberdayakan masyarakat melalui pemberian penguatan, kemampuan, pengetahuan dalam mengelola asset yang ada di dalam masyarakat agar tercapainya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggi.

3. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi akan berhasil apabila strategi yang mendasarinya sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran yang bersangkutan. Pengembangan ekonomi terdapat beberapa maca, strategi yang digunakan dalam pengembangan masyarakat antara lain :

- a) *Direct Contact* (bertatap muka langsung dengan sasaran)

Metode ini adalah dengan menyampaikan ide khusus dan berfikir untuk memecahkan masalah. Metode ini dipandang dapat merangsang minat masyarakat terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan menjadikan mereka berfikir bahwa hal ini amat baik kalau mereka sendiri yang memikirkan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi.

- b. *Demonstrasi Hasil*

masyarakat mengerjakan apa yang mereka kerjakan dengan cara-cara yang mereka kerjakan. Hasil yang diharapkan akan dicapai apabila masyarakat mengikuti cara-cara yang lama yang mereka kuasai.

- c. *Demonstrasi Proses*

Memperlihatkan kepada orang lain bagaimana memperkembangkan sesuatu yang mereka kerjakan sekarang atau mengajari mereka menggunakan sesuatu alat baru.

¹¹Ayub M. Padangaran, Op.cit, h. 31

¹²Jim ife Frank Tesoriere, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi : community Develoment, terj. Sastrawan Manullang dkk.*(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 423.

¹³Ginanjari Kartasmita, *Pengembangan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta : Cides, 1996), h. 142.

d. *Paksaan Sosial*

Suatu strategi yang dengan cara-cara tertentu menciptakan suatu situasi yang terpaksa agar orang bersedia melakukan tindakan sesuai dengan yang dikehendaki. Selain strategi diatas, ada strategi pendekatan konservatif yang berupaya mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat sebagian besar dalam parameter konvensional. Adapun yang dapat dilakukan dalam pengembangan ekonomi konservatif adalah melalui :

Pertama, menarik industry. Pendekatan ini berupaya menemukan cara-cara baru yang membuat masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam ekonomi *mainstream* dengan cara menghimpun inisiatif. Pendekatan ini mencoba menarik industry baru ke wilayah lokal dengan memberikan lingkungan bagus untuk berinvestasi.

Kedua, memulai industry lokal. Pendekatan ini melibatkan pemanfaatan kekayaan sumber daya lokal, bakat, minat dan keahlian serta penafsiran keuntungan-keuntungan alam dari lokalitas tertentu dan kemudian memutuskan apa jenis industry baru yang akan berhasil.

Ketiga, pariwisata. Mempromosikan pariwisata menjadi alternative yang menarik, pariwisata akan menjadi sumber daya yang potensial yang dapat mendatangkan penghasilan, danjuga sebagai industry bersih yang tidak menimbulkan polusi serta dapat mendukung terbukanya tenaga kerja.

Pengembangan ekonomi masyarakat juga merupakan proses pengelolaan potensi Desa yang dimobilisasi masyarakat setempat. Proses pengelolaan potensi juga harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut mengkombinasikan sumber daya manusia dan alam sehingga tercipta kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat dan masalah desa lainnya.

Willy Wirasmita berpendapat bahwa untuk meningkatkan ekonomi perdesaan harus dilakukan dengan strategi pembangunan yang berkarakter, yaitu:

- 1) Mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di dalam ekonomi perdesaan.
- 2) Memaksimalkan penyelesaian perekonomian tidak harus melakukan peminjaman kepada pihak eksternal dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian.
- 3) Memanfaatkan hasil sumber daya pembangunan yang ada dengan memberikan kepastian secara hukum kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelaksanaannya;
- 4) Menjadikan pembangunan terus berkelanjutan untuk masyarakat yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

4. Langkah-langkah Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yaitu dengan jalan memberikan pelatihan sebagai bekal untuk masyarakat memasuki dunia usaha. Adapun langkah-langkah tersebut adalah :

- a) Pelatihan usaha, melalui pelatihan masyarakat diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep usaha dengan segala macam seluk beluk yang ada didalamnya dengan tujuan meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk serta perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha dengan pengembangan jejaringan kemitraan.
- b) Pemagangan, dalam bidang usaha diartikan sebagai pengenalan terhadap realitas usaha secara *intens* dan *empiric*.
- c) Penyusunan proposal, sebagai acuan dan target perkembangan usaha. Melalui penyusunan proposal dapat memungkinkan terjalin kerjasama dengan berbagai lembaga perekonomian.
- d) Permodalan, yang merupakan salah satu factor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting. Untuk mendapatkan permodalan yang stabil diperlukan kerjasama dengan pihak lembaga keuangan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.
- e) Jaringan bisnis, sebagai upaya konsistensi, keberlanjutan usaha yang akan dilaksanakan.

B. Dasar Kebijakan Pemerintah Tentang BUMDes

7. Kedudukan BUMDes

Desa memiliki berbagai potensi baik itu kekayaan sumber daya alam, adat istiadat masyarakat, dan sumber daya manusia yang harus dimobilisasi oleh pemerintah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Gagalnya pembangunan yang orientasinya pembangunan Kota besar menjadikan masyarakat bawah semakin miskin dan termarginalkan. Bahkan lebih dari itu, dampak program pembangunan yang kurang efektif menangani permasalahan masyarakat menyebabkan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat kapitalis yang semakin membuat masyarakat tidak berdaya. Pasca Reformasi, program pembangunan mulai diperbaharui dengan menekankan pembangunan berbasis masyarakat, dimana desa menjadi sasaran utama yang harus dikembangkan karena desa merupakan roda kehidupan manusia dimulai.

Banyak program yang dicanangkan pemerintah untuk memajukan desa, seperti Impres desa Tertinggal (IDT) yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program pembangunan. BUMDes hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi

¹⁴UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

pengelolaan aset desa serta membantu dan mendukung usaha kecamatanamatanani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Aset desa yang dimaksud disini sesuai dengan yang tertera dalam UU No. 6 Tahun 2014 Bab 8 Pasal 76 Bahwa Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Dan pada Pasal 77 Ayat 1 dan 2 bahwa Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan desa.¹⁵ Definisi BUMDes menurut Maryunani, adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Badan Usaha Milik desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat 58 BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain itu Ibrahim mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanahkan dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes. BUMDes harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hal yang dianggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa BUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.⁶⁰ Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri diatas, dapat kita simpulkan bahwa keberadaan BUMDes harus ada di setiap desa yang dibentuk atas dasar kebutuhan

¹⁵Maryunani, *Pengembangan Bundes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), h. 35.

masyarakat untuk mengelola potensi desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

Keberadaan BUMDes di era otonomi daerah pada awalnya tertuang dalam Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi:

- g) hasil usaha desa
- h) hasil kekayaan desa
- i) hasil swadaya dan partisipasi
- j) hasil gotong royong
- k) lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.

Selanjutnya pengaturan mengenai BUMDes terdapat pada Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

8. Implementasi Kebijakan BUMDes

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat

desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Implementasi kebijakan pendirian BUMDes secara umum baru dilaksanakan 25% dilaksanakan oleh aparat desa, karena dalam pendirian BUMDes pengelolaan keuangan dana desa dan BUMDes belum efektif digunakan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan BUMDes kurang diutamakan.

3. Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui BUMDes

BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan Desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian Desa dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Desa masyarakat yang dikelola secara baik dan professional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat Desa untuk meningkatkan ekonomi Desa melalui pengelolaan keuangan Desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes).

Pembangunan Desa sesuai dengan pasal 78 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menanggulangi kemiskinan, sarana prasarana, pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa berkelanjutan menjadi titik sentral dalam pembangunan desa, pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) menjadi tantangan pemerintah desa dalam melakukan berbagai inovasi pembangunan.

Pendampingan terhadap masyarakat Desa penting dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 tentang Desa pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa pendampingan secara berjenjang harus terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan berjenjang artinya bahwa pendampingan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Pendampingan terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berjenjang dengan tetap memperhatikan aspek kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri mempunyai peran strategis dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan. Dari pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan sumber daya yang potensial dan professional yang dapat dijadikan sebagai pondasi dasar dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan.

Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa. Maka strategi pengembangan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa antara lain:¹⁶

- a. Menumbuh kembangkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

BUMDes memiliki tugas untuk meningkatkan pendapatan Desa dan memobilisasi potensi Desa melalui pembentukan Desa sebagai objek wisata. Dimana akan menjadi strategi dalam meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes dengan memobilisasi potensi Desa dengan caea menjadikan Desa sebagai Desa wisata.

Desa wisata menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) adalah suatu kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.

Dewasa ini, pengalihan status Desa menjadi Desa wisata merupakan strategi alternatif dalam menggali serta memobilisasi potensi Desa agar bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun tujuan pengembangan Desa wisata, yaitu :

- a. Mendukung program pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan dengan menyediakan obyek wisata alternative
- b. Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat sekitar desa wisata.
- c. Memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha penduduk
- d. Mendorong orang-orang kota yang secara ekonomi relatif lebih baik
- e. Menimbulkan rasa bangga bagi penduduk Desa untuk tetap tinggal di Desanya
- f. Mempercepat pembauran antara orang-orang non pribumi dengan penduduk pribumi
- g. Memperkokoh persatuan bangsa, sehingga mengatasi disintergrasi.

C. Kajian Terdahulu

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Agung Septian Winarjako pada tahun 2012 yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam

¹⁶Purnomo, *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Makalah (BPMPD, Lombok Timur, 2004) hlm. 17-18.

Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemilagi Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 ditarik kesimpulan bahwa pengurus dan anggota BUMDes telah berperan baik, baik itu dalam segi permodalan maupun dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.¹⁷

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Arrafiqur rahman dengan judul peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat (studi pada BUMDes desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Okan Hulu) ditarik kesimpulan bahwa peningkatan perekonomian hanya terjadi pada pengguna dana BUMDes dibidang perdagangan gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan kelontong, pada perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa. Namun pada perkebunan karet belum terjadi peningkatan perekonomiannya.¹⁸ Untuk itu penulis menyarankan kepada pengguna dana BUMDes harus mempertahankan peningkatan perekonomiannya dan mengembangkan hasil dari usahanya, dan berhati-hati dalam menggunakan dana yang diperoleh.
- 3) Reza M. Zulkarnaen Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta juga ditarik kesimpulan bahwa Keberadaan BUMDES untuk mewujudkan perekonomian desa yang Mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMDES diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara.¹⁹

¹⁷Wijanarko, Agung Septian *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemilagi Kabupaten Mojokerto*.Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” skripsi tahun 2012

¹⁸ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, (Surabaya : CV. Putra Media Nusantara,2009), h. 122.

¹⁹Reza M. Zulkarnaen *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta*, skripsi tahun 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Waktu Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan prosedur-prosedur perhitungan. Dengan demikian penelitian ini hanya memaparkan secara diskriptif (gambaran) tentang Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupatenupaten Deli Serdang²⁰.

1. Gambaran Umum di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - a. Sejarah Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes terpisah dari kegiatan pemerintahan desa diluar struktur organisasi pemerintahan desa. BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Bumdes.id merupakan upaya untuk turut serta dalam upaya percepatan membangun desa. Melalui Bumdes.id dapat membantu dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa. Beberapa program Bumdes.id seperti:

- a. Komunitas Bumdes di (Sekolah Manajemen BumDes)
- b. Pendampingan pembentukan dan pengelolaan Bumdes
- c. Penguatan di bidang keuangan dan Non-keuangan
- b. Visi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Laut Dendang melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan Motto : “MARI BERSAMA MEMBANGUN DESA”
- c. Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - a) Meningkatkan perekonomian desa;

²⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Putra Grafita, 2007), h. 115

- b) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- c) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa;
- d) Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka memberantas kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan;
- d. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - a) Mengembangkan dana Desa untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi warga masyarakat Desa Cimanggu;
 - b) Mendorong usaha kecil kreatif dan usaha rumahtangga untuk berkembang dengan dukungan pembiayaan modal;
 - c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha BUMDes melalui kerja sama usaha;
 - d) Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Desa melalui kegiatan Usaha BUMDes;

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi kepada dua kelompok, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu sumber data utama yang diambil atau yang diperoleh dari orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer tersebut di dapatkan dari Kepala Dinas Sosial Kota Medan dalam Pemberdayaan Anak Jalanan. Data Primer ini juga merupakan data yang di peroleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden).

b. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang berkaitan dengan penelitian, data ini diperoleh dari buku-buku, peraturan yang tertulis atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan internet yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder ini juga merupakan data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa

informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini antara lain :

1. Direktur BUMDes
Nama: Ibu Sadarna AMD
Ttl : Muliarjo, 02 Oktober 1976
Pekerjaan : Guru
2. Sekretaris
Nama : Ibu Sugiarti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
3. Bendahara
Nama : Bapak Sukato
Ttl : 5 Mei 1977
Pekerjaan : Pegawai Swasta

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).
2. Observasi, merupakan salah satu metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan. Secara umum, observasi berarti pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.
3. Dokumen, adalah teknik pengumpulan dengan menyimpan dokumen ang relevan dan terkait dengan permasalahan yang diteliti.²¹

F. Teknik Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka datana dipaparkan dengan cara deskriptif. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis mengenai data-data tersebut. Untuk proses penganalisaan data, maka penganalisaan dilakukan dengan analisa domain (*domain analysis*). Maksudnya ialah peneliti hanya menargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti tanpa harus merinci secara detail unsur-unsur yang ada di dalam keutuhan objek yang diteliti.²²

²¹Imam Supraogo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2003), h. 167

²²Bagong Syanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005), h. 55.

Untuk itu data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif yang terdiri dari:

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan yang tertulis lapangan.
2. Penyajian data ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik Kesimpulan/verifikasi
Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Proses verifikasi data dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan. Data yang telah diperoleh dari catatan-catatan lapangan, dari informasi dan informan yang telah ditemukan, diuji kembali dengan menanyakan kembali pertanyaan yang sama diakhir penelitian ini dan melakukan wawancara kepada Kepala Dina Sosial, staff dan masyarakat sekitar.
4. Triangulasi merupakan Kombinasi beragam sumber data, tenaga penelitian, teori dan teknik metodologi dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri.

Analisis data penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikannya serta memilih milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematikannya, mencari dan menentukan pola apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDes di Desa Laut Dendang

Terdapat 9 (sembilan) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;

1. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
2. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (local wisdom);
3. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat
4. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada didesa
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal
6. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa
7. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (village policy)
8. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
9. Pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Ilmu ekonomi memusatkan pada pembahasan 3 teori dasar : konsumsi (pengeluaran), produksi (pendapatan), distribusi (pasar). Sifat multi dimensi dan

bekerjanya mekanisme pasar memberi implikasi bahwa kesejahteraan masyarakat secara merata dapat dicapai dengan dipenuhinya 3 asumsi dasar :

1. Setiap anggota masyarakat sebagai pelaku ekonomi berperan dalam kegiatan ekonomi (pembangunan);
2. Setiap pelaku ekonomi mempunyai kemampuan (produktivitas);
3. Setiap anggota masyarakat bertindak adil dan rasional²³

Dalam kenyataan asumsi dasar tidak mudah terwujud karena kemampuan masyarakat dalam pemilihan faktor produksi tidak sama dan menimbulkan kesenjangan. Kelangkaan faktor produksi dibandingkan dengan kebutuhan . Kelangkaan tersebut adalah sumber daya alam, sumberdaya manusia (kemampuan dan kelangkaan waktu. Dalam keadaan ini ekonomi pembangunan berupaya untuk mewujudkan pelaksanaan ekonomi secara nyata dan bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Dalam ekonomi pembangunan terkandung pemahaman yang tidak hanya menekankan pada hasil akhir yang dicapai (efisiensi, produktivitas, stabilitas, dan pertumbuhan yang tinggi) tapi juga pada upaya upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Paham pembangunan ekonomi yang dianut sekarang sebenarnya sudah lebih luas dari hanya menitik beratkan pada pertumbuhan tapi juga telah mencakup aspek-aspek pemerataan.²⁴

Disini terletak bidang singgungnya dengan pembangunan sosial, peningkatan lapangan kerja produktif, pendapatan yang merata, penghapusan kemiskinan dan kesenjangan adalah tujuan pembangunan ekonomi yang juga tujuan pembangunan sosial. Misalnya pembangunan bidang pendidikan. Dalam pembangunan ekonomi sama dengan meningkatkan produktivitas. Dalam pembangunan sosial sama dengan menghasilkan manusia yang lebih cerdas, lebih mampu mewujudkan dirinya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nancy Birdsall (1993) secara tegas menyatakan “ Social development is Economic Development”. Investasi di bidang sosial tidak sia-sia dari segi ekonomi.²⁵

Pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial adalah dua muka dari satu mata uang yaitu pembangunan nasional. Tujuan pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi sama tapi pendekatannya yang berbeda dan ukuran-ukurannya juga berbeda semuanya diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang pembangunan nasional.

B. BUMDes Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Desa Laut Dendang

²³ Hasil Wawancara dengan Sadarna AMD sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pada hari senin 6 Agustus 2018

²⁴ Hasil Wawancara dengan Sadarna AMD sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pada hari senin 3 September 2018

²⁵ Hasil Wawancara dengan Sadarna AMD sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pada hari senin 10 September 2018

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam upaya pengembangan usaha dan pemasaran yang didukung permodalan dengan persyaratan yang mudah, murah dan cepat, sehingga hasilnya secara nyata akan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarganya, sehingga akan dapat membantu mempercepat proses kemandirian masyarakat di wilayah tersebut.²⁶

Maksud kegiatan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat adalah untuk memberikan penguatan permodalan kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat di pedesaan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sehingga dapat membantu mempercepat proses kemandirian masyarakat. Sedangkan Tujuan kegiatan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan usaha dengan berbasis sumber daya potensi lokal;
2. Meningkatkan kemandirian masyarakat di pedesaan dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang produktif guna peningkatan kualitas hidup masyarakat;
3. Menggali potensi lokal yang terdapat di wilayah masing-masing guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;²⁷
4. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan serta aksesibilitas bagi kelompok masyarakat dalam pengelolaan usaha di bidang jasa, perdagangan, industri/kerajinan dan pertanian agar mampu mengembangkan diri melalui inovasi-inovasi berorientasi pada kebutuhan kelompok usaha masyarakat.²⁸

C. Hambatan BUMDes Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat di Desa Laut Dendang

²⁶ Hasil Wawancara dengan Sugiarti sebagai Sekertaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pada hari 14 Agustus 2018

²⁷ Hasil Wawancara dengan Sugiarti sebagai Sekertaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pada hari 22 Agustus 2018

²⁸ Hasil Wawancara dengan Sugiarti sebagai Sekertaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pada hari 29 Agustus 2018

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut pada penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di pedesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk pedesaan. BUMDes bukan merupakan kapitalisasi usaha yang ada di desa, oleh sebab itu peran BUMDes adalah mencegah hal tersebut terjadi. Dengan penguasaan sector ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak menjadi upaya perlindungan dan keterjaminan social masyarakat desa itu sendiri. Lebih bagus, adalah mengembangkan usaha ekonomi yang telah ada yang dikelola oleh pemerintah desa atau masyarakat berasal dari program pemerintah

Potensi sumber daya alam sebagian besar terdapat di daerah pedesaan berupa lahan pertanian, sumber air, hutan dan pertambangan serta sumber daya manusia atau tenaga kerja. Ketahanan perekonomian nasional juga berada di desa, sehingga daya tahan ekonomi masyarakat pedesaan perlu mendapat perhatian khusus, baik dalam rangka meningkatkan perekonomian regional dan nasional. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dalam hal ini komponen-komponen yang menjadi pijakan dalam pengembangan BUMDes adalah;

1. Desa sebagai satuan hukum mempunyai otonomi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan mengembangkan kehidupan kemasyarakatan berdasarkan modal sosial yang ada. Untuk itu, perlu ditopang 3 pilar utama, yaitu: kelembagaan pemerintahan, kelembagaan kemasyarakatan, dan kelembagaan ekonomi desa;
2. Dalam perkembangannya, desa telah mengalami dinamika kemajuan yang cukup signifikan. Namun terdapat satu sisi titik lemah yang sampai sekarang belum ditemukan formula strategisnya, yaitu pengembangan kelembagaan perekonomian desa. BUUD-KUD yang dirancang sebagai motor penggerak perekonomian desa terbukti gagal, karena terjadinya penyeragaman, sarat kepentingan dan tidak dikelola dengan kaidah ekonomi yang semestinya;
3. Lemahnya lembaga ekonomi perdesaan membawa konsekuensi: Desa menjadi obyek eksploitasi sumberdaya ekonomi, Desa menjadi obyek pasar komoditas global, Desa tidak mampu menahan peredaran uang dan kemudian tersedot keatas, bahkan desa membiayai kota, tidak terdayagunakannya potensi desa oleh kekuatan desa, kemudian terjadilah migrasi ke kota dan desa menjadi beban pembangunan akibat ketimpangan yang ada.
4. Memahami realitas ini, maka saatnya kebijakan pembentukan BUMDes sebagai pusat pengembangan kelembagaan ekonomi perdesaan mendapatkan perhatian serius.

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Basis sistem kemasyarakatan di desa yang kokoh adalah kekuatan untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Di Indonesia ada kurang lebih 74 ribu desa, dimana lebih dari 32 ribu desa masuk dalam kategori desa tertinggal. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan tujuan otonomi daerah.²⁹

Di era otonomi daerah, seharusnya menjadi perwujudan unjuk kekuatan di berbagai bidang, karena tujuan besar otonomi daerah adalah memperluas kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat desa. Kini desa menghadapi era baru. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hendak mengantarkan desa sebagai penyangga kehidupan. Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik.³⁰

Pada PP Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui PP Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah. Desa memasuki era *self governing community* dimana Desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan. Maka desa bukan lagi penunggu instruksi dari supra desa (Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, dan Pusat). Untuk itu tumpuan dinamika kehidupan desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya kesepakatan pengelolaan desa, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan.³¹

²⁹ Hasil Wawancara dengan Sukato sebagai Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pada hari kamis 30 Agustus 2018

³⁰ Hasil Wawancara dengan Sukato sebagai Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pada hari Kamis 13 September 2018

³¹ Hasil Wawancara dengan Sukato sebagai Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pada hari kamis 24 September 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. BUMDES Karangrejek telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. BUMDES Karangrejek juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat desa yang lebih terjamin. Pembangunan desa pun semakin lancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDES. Berikut uraian dampak BUMDES bagi kesejahteraan masyarakat Desa Karangrejek di bidang ekonomi, kesehatan, dan pembangunan:

a. Dampak Ekonomi

Kegiatan BUMDES di pedesaan menciptakan multiplier effect, terutama dalam bidang ekonomi dimana tercipta banyaknya lapangan pekerjaan dan peluang dalam berusaha. Suatu peluang usaha tersebut menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat yang mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata. Oleh karena itu pendapatan masyarakat menjadi bertambah dan pengangguran berkurang sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

b. Dampak Kesehatan

Melalui BUMDES dengan unit usaha PAB TK, masyarakat yang merasakan kekeringan dan kekurangan air bersih sekarang kebutuhan air telah tercukupi bahkan melimpah. Tidak ditemukan lagi masyarakat yang rela berjalan kaki jauh untuk mendapatkan air. Tidak ditemukan pula masyarakat yang mandi dan mencuci di sungai bersama dengan hewan ternak. Pada musim kemarau panjang pun, masyarakat tetap masih bisa mendapatkan air. Air tetap mengalir di rumah mereka. Kebutuhan untuk minum, memasak, mandi pun sudah tercukupi. Sehingga kesehatan masyarakat pun tidak terganggu.

c. Dampak terhadap pembangunan lingkungan pemukiman berbasis masyarakat (sarana dan prasarana untuk masyarakat)

Secara tidak langsung, masyarakat merasakan dampak pembangunan lingkungan pemukiman di pedesaan yang berasal dari dana BUMDES yang 20% dari keuntungannya dialokasikan kepada pendapatan desa. Melalui dana inilah sarana dan prasarana di pedesaan bisa dibangun. Pembangunan ini tentunya diorientasikan kepada masyarakat desa. Pembangunan tersebut benar-benar untuk memfalisitasi

keperluan masyarakat dalam menjalankan kegiatan mereka seperti jalan desa, drainase, pagar pekarangan, gapura pintu masuk, gardu ronda, sanitasi, dan pembangunan jaringan air bersih.

2. BUMDES Karangrejek belum maksimal dalam menjalankan unit-unit usahanya. Dari ketujuh unit BUMDES yang ada baru tiga yang telah berjalan efektif. Hal tersebut disebabkan karena sumber daya manusia yang belum mahir dalam mengolah unit-unit tersebut. Tetapi adanya tingkat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi terhadap kegiatan BUMDES yang sudah berjalan membuat BUMDES Karangrejek dapat berjalan dengan lancar.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian pelaksanaan program BUMDES di Desa Karangrejek secara umum dikatakan telah berhasil dan berjalan dengan lancar karena berdampak positif bagi masyarakat desa. Implikasi penelitian ini berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam mengembangkan kemampuan berusaha, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Temuan penelitian juga mampu menumbuhkan dan memupuk jiwa kewirausahaan bagi masyarakat desa serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap sebuah kebijakan.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil maka dapat direkomendasikan beberapasaran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam merumuskan program BUMDES, yaitu:

1. Bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDES supaya segera lebih efektif dalam menjalankan unit-unit usaha lain dari BUMDES dengan member pelatihan kepada masyarakat agar tujuan dari BUMDES lebih maksimal sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat yang merata.
2. Bagi pemerintah pusat supaya terus menjalankan kebijakan BUMDES ini, kemudian member pengawasan serta pelatihan bagi desa-desa dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa. Karena kebijakan seperti inilah yang lebih efektif diterapkan di tingkat desa, suatu lembaga usaha ekonomi yang berbadan hukum yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto. Atik. 2002. *Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan.2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Putra Grafita
- Farida. Siti.2011.*Sistem Ekonomi Indonesia*.Bandung: CV Pustaka Setia.
- Narbuko. Cholid. Dkk. 1997.*Metodologi Penelitian*,Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi. Ismail. 2009. *Ekonomi Islam*. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara.
- Sueharto. Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Rekan Aditama.
- Supraogo.Imam.2003. *Metodologi Penelitian Sosial*.Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Syanto.Bagong.2005. *Metode Penelitian Sosial*.Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Hayat. 2013. Realokasi Kebijakan Fiskal; Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Bina Praja*, Volume 6 Nomor 2 Tahun.
- Zubaedi, 2013. *Pengembangan Masyarakat (Wacana dan Praktik)*.Jakarta : Kencana.
- Maryunani, 2008.*Pengembangan Bundes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*.Bandung : CV Pustaka Setia.
- UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Ginjar Kartasmita, 1996. *Pengembangan untuk Rakat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta : Cides.
- Ayub M. Padangan, Op.cit.
- Jim ife Frank Tesoriere, 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi : community Develoment, terj. Sastrawan Manullang dkk*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Puji Hadiyanti, *Menjadi Fasilitator PM yang Kapabel*, disampaikan pada Pelatihan Fasilitator PMI bagi Mahasiswa PM³⁵ Februari 2017.
- JIM Ife Frank Tesoriere, 2008. *Comm Develoment*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ayub M. Padangan, 2011.*Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*,Kendari : Unhalu Press.
- Hasil Wawancara dengan Sadarna AMD sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pada hari senin 6 Agustus 2018
- Hasil Wawancara dengan Sukato sebagai Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pada hari Kamis 13 September 2018
- Hasil Wawancara dengan Sugiarti sebagai Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pada hari 29 Agustus 2018



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Mustopa Husein
Nim : 131440026
Tempat/Tanggal Lahir : Perbatasan, 23 November 1996
Jenis kelamin : laki-Laki
Fakultas/Jurusan : Dakwah & Komunikasi/ Pengembangan
Masyarakat : Islam
Agama : Islam
Alamat : jln. Perhubungan Laut Dendang

Pendidikan

SDN Perbatasan : Tahun 2005 – 2010
MTS Tapus : Tahun 2011 – 2012
MA Tapus : Tahun 2012 - 2014
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : Tahun 2014 – 2018